

PERAN AUDIT EKTERNAL DALAM MEMAJUKAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI JAWA TENGAH: SEBUAH KAJIAN KONSEPTUAL

Eko Suyono^{1*}, Oman Rusmana², Warsidi³, Agus Fathurokhman⁴

^{1,2,3,4}Universitas Jenderal Soedirman

*Email: ekyo75@unsoed.ac.id

Abstrak

Small and Medium Enterprises (SMEs) are the backbone of the economy in most countries around the world, including Indonesia. In Central Java, until the end of the fourth Quarter of 2016, there were 115,751 units of SMEs contributing for 791,767 jobs. Some of the weaknesses of SMEs compared to large and modern businesses is the limited financial condition and difficulties faced when it will apply for funding to the bank. It is because SMEs generally are unable to present the financial statements in accordance with the accounting standards as one of lending criteria from the bank. To overcome the problem, the financial statement of SMEs should be audited by the independent auditors. Therefore, the financial statement of SMEs will be more reliable so that the bank will approve SMEs credit application. In another word, the audit for SMEs can be said as one of the ways to overcome the weakness of SMEs so that SMEs will become more bankable.

Keywords: *small and medium enterprises (SMEs), modern business, financial statement, audit for SMEs*

1. PENDAHULUAN

Usaha kecil dan menengah (UKM) mempunyai peran yang sangat signifikan dalam mendukung perkembangan perekonomian sebuah negara. Sebagai contoh, di negara-negara Uni Eropa, UKM berjumlah sekitar 23 juta unit dan berkontribusi dalam menyumbangkan 75 juta lapangan kerja yang mencerminkan 99% lapangan kerja dari sektor industri di negara-negara tersebut (European Commission, 2009). Demikian juga UKM di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, dimana data resmi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DINKOPUKM) Jawa Tengah sampai akhir Triwulan IV 2016 menunjukkan bahwa terdapat 115.751 unit UKM aktif di Jawa tengah yang terdiri dari sektor produksi/non pertanian berjumlah 39.799, sektor pertanian 19.335 unit, sektor perdaganagn 42.599 unit dan sektor jasa sebanyak 14.018 unit dan berkontribusi menyediakan sebanyak 791.767 lapangan kerja.

Padaahal fakta yang ada menunjukkan bahwa secara umum UKM mempunyai permasalahan berupa keterbatasan sumberdaya baik secara financial maupun non financial. Permasalahan financial berupa keterbatasan modal dan kesulitan dalam akses terhadap sumber-sumber modal sedangkan permasalahan nonfinancial seperti rendahnya skill dan tingkat pendidikan manajer/pemilik, lemahnya jaringan usaha, dan sebagainya yang menyebabkan rendahnya daya saing UKM dibandingkan bisnis modern (Suyono et al., 2016). Lebih lanjut Deakins et al. (2001) menjelaskan bahwa secara umum UKM mempunyai kelemahan seperti rendahnya kualifikasi pendidikan manager atau

pemiliknya yang menyebabkan kurangnya kemampuan dalam pengelolaan keuangan secara profesional dan pemahaman sistem pengendalian intern perusahaan. Beberapa kelemahan UKM tersebut seringkali menyebabkan jenis usaha ini mengalami kesulitan pendanaan ketika berusaha mengajukan pinjaman ke bank. Dengan kata lain, kebanyakan UKM tidak *bankable*. Hal ini karena pada umumnya bank akan memberikan pinjaman pada usaha yang mampu menyajikan posisi keuangan usahanya secara kredibel, sehingga bank akan meminta laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen sebelum memutuskan memberikan kredit kepada sebuah jenis usaha. Hal ini karena bank meyakini bahwa *credit rating* akan menjadi tidak pasti jika laporan keuangan yang disajikan oleh usaha tersebut tidak diaudit oleh auditor independen (Andersson dan Paulsson, 2005) di dalam Ademi dan Stigborn (2010).

Tujuan mendasar dari audit yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen adalah untuk menyajikan sebuah opini audit atas kewajaran penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh klien, dalam konteks tulisan ini adalah UKM. UKM pada umumnya akan memerlukan jasa audit ketika mereka akan mengajukan kredit ke pihak bank. Tanpa diaudit oleh auditor independen, pihak bank tidak akan mempercayai informasi yang disajikan oleh pemilik atau manajer UKM. Supaya bisa mendapatkan opini yang baik dari auditor independen, tentunya, UKM harus mampu memenuhi beberapa kriteria seperti yang disyaratkan dalam standar akuntansi dan audit.

Pada saat ini, standar akuntansi dan audit menjadi semakin kompleks karena berbagai isu yang berhubungan dengan harmonisasi dan konvergensi standard. Pada Juli 2009, *the International Accounting Standards Board (IASB)* mempublikasikan *the International Financial Reporting Standard (IFRS)* untuk UKM. Standar ini dimaksudkan untuk diterapkan pada entitas tanpa akuntabilitas public (Haron et al., 2016). Standar akuntansi untuk UKM yang diterbitkan oleh IASB ini masih terlalu kompleks untuk diterapkan secara total di Indonesia sehingga Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengadopsinya menjadi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia pada tahun 2011. Oleh karena itu, jika UKM akan diaudit oleh auditor independen maka UKM harus mampu menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam SAK ETAP.

Tabone dan Baldacchino (2003) menyatakan bahwa di dalam UKM, audit eksternal diperlukan manakala terdapat perbedaan informasi antara manajer yang biasanya adalah pemilik usaha dengan para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Akan tetapi, berbagai literatur menyebutkan bahwa banyak UKM di negara-negara Uni Eropa yang meniadakan adanya audit eksternal karena tingginya biaya audit tersebut. Namun demikian, beberapa penelitian juga menemukan bahwa di beberapa negara Uni Eropa seperti Denmark ditemukan bukti empiris bahwa permintaan audit yang dilakukan secara sukarela oleh UKM cenderung meningkat dimana 78% UKM melakukan audit eksternal secara sukarela (Franzen, 2010). Selanjutnya Sheresta dan Wai (2011) yang melakukan penelitian di Swedia berargumen bahwa UKM yang secara sukarela melakukan audit eksternal akan mendapatkan beberapa keuntungan, yaitu: menjamin akurasi data pelaporan keuangan, bisa membayarkan pajaknya secara benar, lebih mudah mendapatkan pinjaman bank, dan akan mempunyai relasi yang lebih baik dengan kreditur, investor, dan pemasok.

Berdasarkan berbagai argumentasi di atas, maka perumusan masalah dalam tulisan ini adalah apakah kemungkinan keuntungan yang akan diperoleh jika UKM di

Jawa Tengah bersedia melakukan audit laporan keuangan secara sukarela oleh auditor independen.

2. KAJIAN PUSTAKA & TELAAHN PUSTAKA

2.1 Berbagai Teori tentang Pentingnya Audit

Hayes et al. (2005) menjelaskan beberapa teori yang bisa menjelaskan kebutuhan jasa audit, yaitu : policeman's theory, lending credibility theory, theory of inspired confidence, dan agency theory. Policeman's theory mengkaim bahwa auditor bertanggung jawab untuk mencari, menemukan, dan mencegah kecurangan dalam perusahaan klien. Akan tetapi, saat ini focus auditor lebih pada memberikan jaminan yang memadai dan memverifikasi kewajaran laporan keuangan sehingga apakah menjadi tanggung jawab auditor atau bukan untuk mendeteksi kecurangan masih menjadi perdebatan (Hayes et al., 2005).

Porter (1990) mengembangkan *the Lending Credibility theory*, dimana dari sudut pandang manajemen, klien akan menggunakan laporan keuangan yang sudah diaudit dalam rangka meningkatkan kepercayaan *stakeholders* terhadap manajemen. Hal ini karena *stakeholders* seringkali harus melakukan penilaian terhadap reliabilitas laporan keuangan dan mereka akan lebih percaya jika laporan keuangan tersebut sudah diaudit oleh auditor independen. Akan tetapi Porter (1990) juga menjelaskan bahwa terdapat teori lain, yaitu "*efficient market theory*" yang menyatakan bahwa *the Lending Credibility theory* dan informasi yang diberikan oleh aditor dalam laporan keuangan auditan tidaklah sepenuhnya menjadi dasar penilaian para investor dalam memutuskan investasi.

Theory of inspired confidence dikembangkan di akhir tahun 1920an oleh Theodore Limperg, seorang professor asal Belanda (Limperg Institute, 1985). Teori ini bisa digunakan untuk menjelaskan hubungan permintaan dan penawaran jasa audit. Permintaan jasa audit merupakan konsekuensi langsung akibat adanya partisipasi dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan, seperti investor, stockholder, kreditur, dan sebagainya. Pihak-pihak tersebut akan meminta pertanggungjawaban manajemen sebagai imbalan dari investasi yang mereka tanamkan dalam perusahaan. Pertanggungjawaban akan diwujudkan melalui penerbitan laporan keuangan perusahaan secara periodik, sehingga karena informasi di dalam laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen berpotensi bias maka sebuah audit diperlukan untuk menjamin keterandalan informasi tersebut.

Selanjutnya dari perspective *agency theory*, Watts dan Zimmerman (1979, 1986) berpendapat bahwa auditor ditunjuk dalam kepentingan semua pihak, baik pihak ketiga yang berkepentingan maupun manajemen perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan dipandang sebagai sebuah jaringan kontrak. Selanjutnya beberapa kelompok seperti : pemasok, bank, pelanggan, karyawan, dan sebagainya berkontribusi dalam menetapkan sebuah harga perusahaan. Sehingga, tugas manajemen adalah untuk mengkoordinasikan kelompok-kelompok ini dengan kontrak yang ada di dalam perusahaan, supaya perusahaan mampu menciptakan jaringan pemasok murah untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, harga yang cukup bagus untuk dijual ke konsumen, bunga yang rendah untuk pinjaman bank, harga saham perusahaan yang tinggi, dan upah buruh yang murah.

2.2 Manfaat Audit

Berbagai literatur yang ada menjelaskan betapa pentingnya audit bagi sebuah bisnis. Sebagaimana yang dijelaskan di atas, audit sangatlah bermanfaat dalam mengelola risiko munculnya informasi keuangan yang menyesatkan bagi para pengguna laporan keuangan. Berkurangnya risiko informasi setelah laporan keuangan diaudit oleh auditor independen dapat meningkatkan kepercayaan bank ketika sebuah UKM akan mengajukan pendanaan usaha.

Haron et al. (2016) berpendapat bahwa audit akan mampu mengurangi risiko bagi para investor dan mampu memfasilitasi UKM untuk mendapatkan permodalan. Selanjutnya dia menjelaskan bahwa audit mampu mengurangi kemungkinan kesalahan yang disengaja yang mengarah pada kecurangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Lebih lanjut, penelitian tersebut menjelaskan bahwa audit merupakan salah satu upaya yang bisa ditempuh perusahaan untuk meyakinkan otoritas pajak bahwa perusahaan telah menjalankan kewajiban yang berhubungan dengan perpajakan secara benar. Hal senada disampaikan oleh Andersson dan Paulsson (2005) di dalam Ademi dan Stigborn (2010) bahwa audit merupakan alat untuk menjamin solvabilitas perusahaan dan status keuangan perusahaan secara umum. Lebih jauh dia menjelaskan bahwa stakeholders seperti pemasok, kreditur, dan konsumen memerlukan jaminan akan posisi kinerja perusahaan melalui informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang diaudit oleh auditor independen. Dengan demikian, audit akan lebih bermanfaat bagi stakeholders seperti bank, pemasok, otoritas pajak, disamping biaya audit yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Axenborg (2005) di dalam Kaur et al. (2007) menyatakan bahwa audit akan memberikan UKM daya saing yang lebih baik, dimana secara tidak langsung UKM dituntut untuk memahami standar akuntansi keuangan yang harus diikuti dalam menyusun laporan keuangan. Adams et al. (2005) menyatakan bahwa audit laporan keuangan sangatlah diperlukan untuk mengurangi *information asymmetry* antara manajer dan pemilik UKM atau antara manajer dan karyawan UKM ketika manajernya sekaligus pemilik perusahaan. Selanjutnya Moore dan Ronen (1990) menemukan bukti empiris bahwa manfaat audit akan lebih dirasakan ketika UKM memerlukan pendanaan dari pihak eksternal, baik bank maupun investor. Guntert (2000) berpendapat bahwa audit UKM akan meningkatkan kepercayaan manajer/pemilik akan keterandalan sistem akuntansi dalam perusahaan yang mampu menyajikan informasi yang terpercaya bagi seluruh pengguna laporan keuangan. Pandangan ini juga didukung oleh bukti empiris melalui penelitian di UK yang dilakukan oleh Collis et al. (2004).

2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Keuangan

Berbagai literatur yang ada menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi audit laporan keuangan, yaitu sistem pengendalian intern, bukti audit, dan ketaatan terhadap standar akuntansi.

2.3.1 Pengendalian Intern (*Internal Control*)

Pengendalian intern didefinisikan sebagai sebuah integrasi aktivitas, rencana, perilaku, kebijakan, sistem, sumber daya, dan upaya orang-orang dalam sebuah perusahaan yang bekerja sama untuk mendapatkan jaminan bahwa perusahaan akan mampu mencapai misi dan tujuannya (Baltaci dan Yilmas, 2006). Sehingga bisa kita simpulkan bahwa pengendalian intern memusatkan perhatiannya pada pencapaian misi

perusahaan, sehingga manajer dan seluruh karyawan harus mencurahkan perhatian mereka dalam menerapkan paktek-praktek pengendalian intern yang memadai. Selanjutnya Amudo dan Inanga (2009) dan Jokipii (2010) menjelaskan bahwa pengendalian intern merupakan sebuah proses yang akan memandu perusahaan dalam mencapai misi dan tujuannya secara benar.

Di dalam UKM, manajer atau pemilik bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan, mengevaluasi kinerja, dan melakukan tindakan perbaikan jika implementasi kebijakan dinilai kurang efektif. The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) (2013) menjelaskan pengertian pengendalian intern sebagai sebuah proses di dalam sebuah organisasi yang dirancang untuk menyediakan jaminan terkait dengan beberapa tujuan perusahaan, yaitu : reliabilitas dan integritas informasi, ketaatan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, aturan, keamanan asset, penggunaan sumberdaya secara ekonomis dan efisien, dan pencapaian sasaran-saran perusahaan yang telah ditetapkan.

Dari berbagai pengertian diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa penerapan pengendalian intern bersifat dinamis bergantung pada ukuran perusahaan. Perusahaan besar akan membutuhkan pengendalian intern dengan struktur yang kompleks, sedangkan UKM akan membutuhkan sistem pengendalian intern dengan struktur yang lebih sederhana. Merupakan tanggung jawab manajemen yang harus menjamin bahwa pengendalian intern bisa diterapkan secara efektif dalam organisasi. Selanjutnya, auditor akan berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang memadai akan kondisi pengendalian intern pada perusahaan klien. Dalam hal ini, auditor akan mengevaluasi rancangan sistem pengendalian untuk memastikan bahwa pengendalian telah dijalankan dengan baik dan prosedur diikuti oleh seluruh karyawan perusahaan klien.

Al-Twaijry et al. (2004) menemukan bukti empiris bahwa efektivitas pengendalian intern akan membantu auditor eksternal mengandalkan pekerjaan auditor internal sehingga akan meningkatkan efektivitas pengendalian intern dalam perusahaan. Sehingga, sistem pengendalian intern merupakan komponen integral dari proses manajemen dalam UKM yang harus dibangun dalam rangka mendapatkan jaminan bahwa operasi perusahaan dijalankan secara efektif dan efisien.

Adapun masalah yang dihadapi UKM terkait dengan konsep pengendalian intern seperti dijelaskan di atas adalah bahwa secara umum UKM belum menerapkan pengendalian intern secara memadai. Sedangkan kita ketahui dari penjelasan pada seksi sebelumnya bahwa pengendalian intern yang kuat diperlukan perusahaan untuk mengurangi risiko informasim, sehingga menjadi tanggung jawab manajer atau pemilik UKM untuk menjamin bahwa pengendalian intern yang memadai bisa diterapkan pada UKM. Disamping itu, seluruh karyawan juga harus mendukung upaya-upaya manajemen untuk memastikan bahwa pengendalian intern berjalan dengan baik. Adapun peran auditor adalah membantu manajemen melalui audit yang independen dalam mengevaluasi sistem pengendalian intern UKM.

2.3.2 Bukti Audit (*Audit Evidence*)

Bukti audit merupakan informasi yang menyediakan dasar faktual untuk penerbitan opini auditor. Bukti ini berupa informasi yang didokumentasikan oleh auditor yang diperoleh melalui observasi kondisi, wawancara dengan perusahaan, pengujian catatan-catatan dan dokumen-dokumen (Kaptein et al., 2009; Agoglia et al.,

2009). Informasi tersebut dapat dalam berbagai bentuk, seperti dokumen-dokumen dan informasi secara lisan, serta dari berbagai sumber, seperti sistem informasi perusahaan.

International Standard on Auditing (ISA) 500 mensyaratkan auditor supaya bisa memenuhi standar minimum terkait dengan pengumpulan bukti audit, demikian pula *ISA 501* menyediakan petunjuk yang mendukung *ISA 500* sehingga auditor bisa mendapatkan contoh-contoh bukti audit yang sesuai dengan kriteria minimal (IFAC, 2010). Kaptein et al. (2009) menyatakan bahwa auditor mendokumentasikan serangkaian informasi yang menyediakan bukti-bukti untuk mendukung opininya. Auditor harus mendapatkan pengetahuan yang memadai tentang bisnis klien yang akan diaudit untuk memudahkan mereka dalam mengidentifikasi dan memahami kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, dan praktik-praktik yang mungkin mempunyai efek signifikan terhadap laporan keuangan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh COSO (2013) bahwa tujuan audit laporan keuangan adalah untuk memungkinkan auditor memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan oleh klien.

Dalam rangka mencapai tujuan di atas, auditor harus mengikuti prosedur yang dirancang guna mendapatkan bukti audit yang cukup dan berkualitas yang sesuai dengan standar audit untuk menentukan bahwa laporan keuangan terbebas dari adanya salah saji yang material. Rittenberg et al. (2005) menjelaskan bahwa auditor harus mengumpulkan jumlah bukti yang mencukupi untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan tidak bertentangan dengan *Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)*.

Seluruh prosedur dalam mendapatkan bahan bukti audit seperti dijelaskan di atas, idealnya bisa dijalankan semua sekalipun untuk audit terhadap UKM. Namun demikian, auditor bisa mendasari kriteria kecukupan dan kualitas bukti untuk audit UKM berdasarkan *professional judgment* yang dia miliki, sehingga tentunya dalam menetapkan berbagai kriteria di atas dalam audit UKM sedikit lebih longgar jika dibandingkan dengan audit perusahaan besar.

2.3.3 Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi

GAAP bisa dijadikan sebagai petunjuk umum dalam menetapkan rerangka audit dimana seorang auditor memutuskan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam persiapan pengujian laporan keuangan, dalam melakukan pengujian, dan dalam penulisan laporan audit.

Molid (2009) menyatakan bahwa tujuan dari *International Accounting Standards (IAS)* mencakup harmonisasi perkembangan profesi audit dalam rangka mengikuti perkembangan dunia bisnis, menjembatani auditor di seluruh dunia, menjamin bahwa standar ada dalam level yang bisa diterima secara profesional. Secara umum, standar sangatlah diperlukan untuk mengorganisasikan anggota profesi dan mempromosikan ukuran-ukuran standar dalam evaluasi kinerja para anggota profesi.

Indonesia mengenal Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk perusahaan-perusahaan yang go public, dan SAK untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP). Sehingga dalam hal audit atas UKM, auditor akan menjadikan SAK ETAP sebagai acuan untuk menilai sejauh mana UKM mentaati dan mengacu SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangannya.

3. METODE

Tulisan ini merupakan pengembangan konseptual yang bersumber dari berbagai literatur dalam bidang akuntansi dan auditing. Penulis telah melakukan penelaahan semua literatur yang berhubungan dengan audit untuk UKM atau *audit for small and medium business enterprises* baik melalui penelusuran secara elektronik dengan internet maupun dengan mengunjungi perpustakaan di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah. Selanjutnya hasil penelaahan tersebut disajikan dalam tulisan ini dengan sistematika yang terdiri dari : pendahuluan, kajian pustaka, metode, hasil dan pembahasan, dan simpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari diskusi pada bagian sebelumnya dalam tulisan ini yang bersumber dari berbagai literatur yang ada bisa dinyatakan bahwa audit keuangan yang dilakukan pada UKM akan mampu meningkatkan reliabilitas informasi yang tersaji dalam laporan keuangan UKM. Sehingga jika UKM mampu menyajikan laporan keuangan dengan informasi yang akurat dan andal, akan meningkatkan kepercayaan pihak bank dalam memberikan pendanaan bagi UKM. Hal ini akan bisa mengatasi salah satu kelemahan UKM dibanding usaha besar dan modern, dimana umumnya UKM mengalami kesulitan mendapatkan permodalan dari bank karena UKM tidak mampu menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dengan dilakukannya audit, risiko informasi yang terdapat dalam laporan keuangan UKM akan menurun dan kualitas informasi akan meningkat, yang pada akhirnya laporan keuangan UKM yang telah diaudit oleh auditor independen akan lebih dipercaya pihak bank ketika UKM mengajukan aplikasi pinjaman.

Walaupun pada awalnya audit laporan keuangan UKM hanya mereka lakukan untuk memenuhi persyaratan ketika UKM akan mengajukan pendanaan ke bank, namun diharapkan akan memunculkan kesadaran bagi UKM mengenai pentingnya audit bagi UKM. Dengan demikian, diharapkan audit keuangan pada UKM setidaknya menguntungkan UKM dari berbagai perspektif (Kaur et al., 2007; Ademi dan Stigborn, 2010; dan sebagainya), yaitu :

4.1 Perspektif Manajer atau Pemilik

Pemilik yang mempunyai kontribusi besar dalam investasi modal diperusahaan mempunyai risiko hilangnya modal, akan mampu mendapatkan *return* yang lebih tinggi dari investasi yang mereka lakukan akibat naiknya kepercayaan investor dan kreditur setelah laporan keuangan UKM diaudit oleh auditor independen. Sehingga jika UKM mempunyai sistem akuntansi yang baik, risiko informasi yang pada akhirnya bisa merugikan pemilik UKM akan bisa dihindari. Dalam hal ini pemilik UKM akan melihat audit keuangan UKM sebagai mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan seluruh karyawan, walaupun konteksnya akan berbeda dengan perusahaan besar yang secara nyata melakukan pemisahan antara *ownership* dan *control*.

4.2 Perspektif Pemerintah

Pemerintah akan menjadikan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor independen sebagai dasar yang bisa dipercaya untuk penghitungan pajak perusahaan.

Karena peran UKM yang sangat signifikan dalam menopang perekonomian suatu negara, sangat dimungkinkan pemerintah akan lebih memonitor UKM khususnya yang bergerak dalam penyediaan produk atau jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat. Terlebih lagi jumlah UKM di Provinsi Jawa Tengah, dimana data resmi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DINKOPUKM) Jawa Tengah sampai akhir Triwulan IV 2016 menunjukkan bahwa terdapat 115.751 unit UKM aktif. Tentunya jumlah UKM di Jawa Tengah yang begitu banyak akan berkontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) untuk seluruh kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, ketika seluruh UKM tersebut bersedia melakukan audit laporan keuangan secara sukarela, pemerintah akan mendapatkan data yang akurat terkait dengan penghitungan pajak UKM tersebut.

4.3 Perspektif Kreditur

Ketika pemilik perusahaan tidak mampu mendanai seluruh aktivitas UKM dari modalnya sendiri maka dia akan mencoba mendapatkan dana dari kreditur. Sebagai imbalannya, kreditur akan menetapkan bunga pinjaman. Umumnya, tingkat bunga pinjaman akan sangat bergantung pada jumlah pinjaman dan jangka waktu pinjaman. Sehingga semenjak itu, kreditur mempunyai peran yang cukup signifikan di dalam perusahaan. Oleh karenanya, semua permintaan kreditur akan menjadi perhatian pemilik/manajer UKM.

Selain itu, kreditur harus menanggung risiko gagal bayar (*default*) perusahaan dalam hal pemberian pinjaman. Dalam hal ini, perusahaan harus mengamankan posisi keuangan dan kepercayaan mereka saat mereka mencoba meminjam dari lembaga keuangan. Dalam hal ini, audit mengambil peran sebagai perantara yang aman antara kreditur dan peminjam. Ini bisa dikatakan sebagai pandangan kreditur atas pentingnya audit (Kaur et al., 2007). Dengan kata lain, ketika UKM bersedia melakukan audit laporan keuangan secara sukarela maka risiko yang dihadapi kreditur akan kemungkinan UKM mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari pinjaman akan menjadi lebih kecil.

4.4 Perspektif Konsumen

Konsumen mempunyai kontribusi terhadap perusahaan sebagai pembeli produk atau pengguna jasa. Informasi terpercaya yang disediakan perusahaan dapat berupa kualitas produk, pengiriman tepat waktu dan garansi produk (Ademi dan Stigborn, 2010). Dalam posisi yang berbeda, pemasok yang memasok produk atau jasa kepada UKM juga ingin mendapatkan garansi dari perusahaan. Dalam konteks ini laporan auditor dapat dikatakan sebagai sebuah *controlling statement* yang menjamin UKM bisa mengirimkan produk/jasa secara tepat waktu kepada konsumennya sehingga perusahaan akan bisa membayarkannya secara tepat waktu kepada pemasok (Kaur et al., 2007). Walaupun laporan audit tidak secara langsung dibaca oleh konsumen, tetapi bisa kita simpulkan bahwa dalam hubungan antara konsumen dan pemasok, laporan audit dapat mencapai visibilitas dan transparansi informasi.

4.5 Perspektif Karyawan

Karyawan yang mendapatkan gaji dan kompensasi lainnya dari perusahaan akan berkontribusi dalam bentuk kinerja mereka yang baik kepada perusahaan. Jika skema kompensasi mereka dibentuk oleh kinerja keuangan perusahaan, audit dapat menjadi

mekanisme yang dapat diandalkan untuk kontribusi kinerja mereka terhadap perusahaan.

Dari pembahasan di atas, secara normatif akan banyak keuntungan yang bisa diperoleh UKM jika mereka bersedia melakukan audit keuangan secara sukarela. Namun demikian, kebanyakan UKM masih berfikir bahwa audit merupakan sebuah proses yang mahal sehingga mereka hanya akan melakukannya ketika ada manfaat langsung yang akan mereka peroleh, seperti jaminan cairnya pinjaman dari bank untuk mendanai usaha mereka. Untuk mengatasi masalah ini maka pemerintah bisa bekerja sama dengan para ahli dari perguruan tinggi untuk melakukan sosialisasi manfaat audit keuangan bagi UKM dalam jangka panjang sehingga UKM akan mendapatkan pemahaman yang baik akan *benefit* audit. Pemerintah juga dapat menggandeng para peneliti dan pengabdian dari perguruan tinggi untuk mengalokasikan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bisa membantu mensukseskan audit bagi UKM. Sehingga secara bertahap akan terbentuk lingkungan bisnis UKM yang menyadari betul akan perlunya menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi berterima umum dan perlunya laporan keuangan tersebut diaudit oleh auditor independen.

5. KESIMPULAN

Tujuan audit yang dilakukan oleh auditor independen adalah untuk menyajikan opini apakah klien menyajikan secara wajar posisi keuangan perusahaan, hasil-hasil operasi, dan perubahan-perubahan dalam posisi keuangan sudah bersesuaian dengan prinsip akuntansi berterima umum. Auditor harus menyatakan bahwa proses audit telah dilakukan sesuai dengan standar auditing. Supaya auditor bisa menyelesaikan proses audit sesuai dengan standar dimaksud maka audit harus direncanakan secara baik yang mencakup jumlah personel auditor yang memadai dalam proses audit secara menyeluruh. Pada tahap perencanaan audit, UKM harus mendiskusikan dengan auditor mengenai pendekatan audit yang bisa diterapkan, termasuk juga tujuan audit, dan skop auditnya.

Komunikasi antara auditor dan manajemen UKM harus dilakukan secara bebas sehingga mereka akan dapat melakukan pekerjaan audit secara baik. Melalui informasi yang ada di dalam laporan keuangan, auditor harus mampu memberikan jaminan akan seluruh nilai yang diungkapkan di dalam laporan keuangan. Sehingga pada akhirnya audit keuangan pada UKM akan menjadi tantangan tersendiri bagi KAP di Indonesia.

Dengan dilakukannya audit laporan keuangan pada UKM di Jawa tengah diharapkan kualitas informasi yang tersaji dalam laporan keuangan UKM di Jawa Tengah akan menjadi lebih andal. Ketika tujuan ini bisa dicapai, maka UKM tidak akan lagi menghadapi kesulitan ketika mengajukan pendanaan pada pihak bank karena UKM akan menjadi lebih *bankable*. Dengan demikian audit laporan keuangan UKM akan berperan dalam mengatasi salah satu masalah yang dihadapi UKM dalam menjalankan usanya, yaitu berupa kurangnya permodalan. Hal ini akan teratasi karena dengan adanya audit laporan keuangan UKM, bank akan memberikan kepercayaan lebih pada UKM ketika jenis usaha ini mengajukan pendanaan kepada bank. Dengan kata lain audit UKM akan menguntungkan UKM dalam hal pengajuan pendanaan terhadap pihak bank.

Adapun manfaat lain yang bisa diperoleh UKM ketika usaha ini bersedia secara sukarela melakukan audit laporan keuangan adalah dari sisi pemerintah, konsumen, dan karyawan. Dari sisi pemerintah, UKM akan mampu menyajikan informasi yang akurat

terkait dengan penghitungan pajak sebagai sumber pemasukan pemerintah sekaligus kontribusi UKM terhadap pemerintah daerah. Dari perspektif konsumen, mereka akan mempercayai UKM sebagai organisasi bisnis yang transparan. Sedangkan dari perspektif karyawan, maka ketika karyawan mendapatkan gaji, bonus, dan kompensasi lainnya dengan dasar yang transparan akan mendorong mereka berkinerja lebih baik. Kinerja karyawan yang baik pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan profitabilitas UKM.

Untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat audit bagi bisnis UKM dalam jangka panjang, pemerintah perlu terus mensosialisasikan masalah tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan para peneliti dan pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi supaya mereka turut berkontribusi mengatasi masalah tersebut. Dengan terselesaikannya salah satu permasalahan yang dihadapi UKM, selanjutnya pemerintah bisa menfokuskan upayanya untuk memecahkan permasalahan UKM yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, F., Bedard, J.C., & Johnstone, K.M. (2005). *Information Asymmetry and Competitive Bidding in Auditing*. *Economic Inquiry*, 43 (2), 417-425.
- Ademi, A., & Stigborn, A. (2010). *To Audit or Not To Audit? - How Is Audit Being Used In Banks' Credit Rating Processes?*. Bachelor Thesis. Kristianstad: Kristianstad University.
- Agoglia, C., Hatfield, R., & Brazel, J. (2009). *The Effects of Audit Review Format on Review Team Judgments*. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, 28 (1), 95-111.
- Amudo, A., & Inanga, E. L. (2009). *Evaluation of Internal Control Systems: A Case Study From Uganda*. *International Research Journal of Finance and Economics*, 3, 124 -144.
- Al-Twaijry, A. A.M., Brierley, J. A., & Gwilliam, D. R. (2004). *An Examination of The Relationship Between Internal And External Audit In The Saudi Arabian Corporate Sector*. *Managerial Auditing Journal*, 19(7), 929-944.
- Baltaci, M. & Yilmaz, S. (2006). *Keeping an Eye on Subnational Governments: Internal Control and Audit at Local Levels*. World Bank Institute Washington, D.C.
- Collis, J., Jarvis, R., & Skerratt, L. (2004). *The Demand for The Audit In Small Companies In The UK*. *Accounting and Business Research*, 34 (2), 87-100.
- COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). (2013). *COSO Framework and SOX Compliance*. USA
- Deakins, D., Logan, D. & Steele, L. (2001). *The Financial Management of The Small Enterprise*, ACCA Research Report No. 64. London: The Association of Chartered Accountants, Certified Accountants Education Trust.
- DINKOPUKM Jawa Tengah (2016). *Time Series Data Umkm Binaan Provinsi Jawa Tengah*, diunduh dari <http://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/assets/upload/files/DATA%20SERIES%20UMKM%20TW%20IV%202016.pdf>
- European Commission. (2009). *Commission Staff Working Document on The Implementation of Commission Recommendation of 6 May, 2003, Concerning The Definition Of Micro, Small and Medium-Sized Enterprises*. Working Paper, Brussels: European Commission

- Franzen, L. (2010). *What to Provide and How To Provide It? A Study on Small Companies' Demand for Audit and Alternative Services*. Master Thesis. Umeå: Umeå School of Business
- Guntert, A. (2000). *Audit Plaudits: Good News for Companies and Practitioners. Or Is It?*. Accountancy, June, 75-76.
- Haron, H., Ismail, I., Ganesan, Y., & Hamzah, Z. (2016). *Audit Exemption for Small And Medium Enterprises: Perceptions Of Malaysian Auditors*. Asian Academy of Management Journal, 21 (2), 153–182.
- Hayes, R., Dassen R., Schilder, A. & Wallage, P. (2005). *Principles of Auditors: An Introduction to International Standards on Audit*. Edinburgh: Pearson Education Limited. London.
- International Federation of Accountants [IFAC]. (2010). 2010. *Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements*. New York: International Federation of Accountants [IFAC]
- Jokipii, A. (2010). *Determinants and Consequences of Internal Control in Firms: A Contingency Theory Based Analysis*. Journal Management Governace, 14, 115–144.
- Kaptein, H., Prakken, H., & Verheij, B. (2009). *Legal Evidence and Proof: Statistics, Stories, Logic*. Ashgate Ltd., UK.
- Kaur, J., Kristensson, Y., & Kurt, N. (2007). *Statutory Audit: Benefits of Maintaining Audit After The Abolishment*. Bachelor Thesis. Jönköping: Jönköping International Business School.
- Limberg Institute. (1985). *The Social Responsibility of The Auditor. A Basic Theory on The Auditor's Function*, Amsterdam, The Netherlands.
- Molid, S. (2009). *Analyzing Study. The International Auditing Standards*. Journal of Administrative Science,1; 123-145.
- Moore, G., & Ronen, J. (1990). *External Audit and Asymmetry Information*. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 9 (10), 234-242.